



## **TRANSFORMASI KURIKULUM PAUD: MENELUSURI PERUBAHAN KURIKULUM 1984 HINGGA KINI**

**Lathipah Hasanah<sup>1</sup> Safira Permata Hati<sup>2</sup> Nurjaemah<sup>3</sup> Ridzkya Ariyani<sup>4</sup> Siti Sarah Dude<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
e-mail korespondensi: [latifahasanah@uinjkt.ac.id](mailto:latifahasanah@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*The transformation of Early Childhood Education (ECE) curriculum in Indonesia is a long process that reflects adjustments to the changing times, the needs of learners, and shifts in national education policies. This study aims to trace the evolution of the ECE curriculum from the 1984 Curriculum to the currently implemented Merdeka Curriculum. The method used is a literature review by analyzing various scholarly sources and educational policy documents. The findings reveal that each curriculum carries its own approach, strengths, and challenges. The 1984 Curriculum emphasized active learning through the Active Student Learning Method (CBSA), while the 1994 Curriculum was more structural and academic in nature. The 2004 Curriculum introduced a competency-based approach, followed by the 2009 School-Based Curriculum (KTSP), which granted schools more autonomy to design their curriculum based on local contexts. The 2013 Curriculum adopted an integrative thematic approach and emphasized character education, aligning with 21st-century learning needs. The current Merdeka Curriculum focuses on differentiated learning, the reinforcement of the Pancasila Student Profile, and flexibility for teachers in planning learning activities according to children's needs and interests. However, its implementation in the field faces several challenges, such as unprepared educators, limited facilities and infrastructure, and unequal understanding of the curriculum's core essence. Therefore, strong collaboration among the government, educators, and the community is crucial to realize an adaptive, contextual, and development-oriented ECE system that supports holistic and sustainable child development.*

*Keywords: Transformation, Curriculum, ECE.*

### **PENDAHULUAN**

Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang karena dikenal sebagai masa emas (golden age) yang sangat menentukan dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, serta kognitif anak (Ariyanti, 2016). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki tujuan untuk memberikan stimulasi secara maksimal agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (Yunita & Suryana, 2022). Pendidikan pada tahap ini diawali melalui pembiasaan serta interaksi yang bertujuan membentuk karakter dan kemandirian anak (Hidayat & Abdillah, 2019).

Dalam upaya mendukung pendidikan anak usia dini, kurikulum memiliki peran vital sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang terarah dan sesuai konteks (Khaironi & Yuliastri, 2017). Kurikulum terus disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan pengetahuan (Windayani et al., 2021). Perubahan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menghadapi dinamika tersebut (Fadhila et al., 2023). Salah satu wujud nyatanya adalah telah dilakukannya sebelas kali revisi kurikulum sejak tahun 1947 hingga 2022 (Nursalim et al., 2024). Pemerintah terus mengarahkan sistem pendidikan agar sejalan dengan tantangan zaman (Setiyorini & Setiawan, 2023). Proses pengembangan kurikulum merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman dan bertujuan menciptakan pendidikan yang berkualitas (Insani, 2019). Evaluasi secara berkala terhadap perubahan kurikulum diperlukan agar tetap relevan dan efektif (Setiyadi, 2020).

Penelitian ini akan membahas dinamika transformasi kurikulum, dasar-dasar pengembangannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sejak masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini (Tabrani, & Dkk. (2024)). Transformasi kurikulum merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sistem pendidikan. Di Indonesia, perubahan kurikulum telah terjadi berkali-kali, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan anak usia dini. Setiap perubahan mencerminkan adanya evaluasi terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya serta usaha untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang (Munastiwi, 2014). Pada jenjang PAUD sendiri, kurikulum telah mengalami serangkaian transformasi sejak diberlakukannya Kurikulum TK 1984, dilanjutkan dengan Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, hingga Kurikulum 2013, dan kini memasuki era Kurikulum Merdeka (Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 2022).

Setiap kurikulum hadir dengan ciri khas dan pendekatannya masing-masing. Misalnya, kurikulum 1984 masih menekankan pembelajaran yang bersifat klasikal dan akademis, Sementara itu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Adapun kurikulum 2013 sudah lebih menitikberatkan pada pengembangan karakter dan pendekatan tematik (Kemendikbud, 2015). Kurikulum Merdeka sendiri hadir dengan semangat fleksibilitas, diferensiasi, serta penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan perkembangan sesuai konteks lokal (Kemendikbudristek, 2024).

Namun, transformasi kurikulum juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam proses implementasinya di lapangan. Banyak guru yang belum sepenuhnya siap dengan pendekatan baru, keterbatasan pelatihan dan fasilitas, hingga perbedaan pemahaman antara lembaga dan masyarakat (Nurgiyantoro, 2012). Perubahan kurikulum membutuhkan proses adaptasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir para pendidik dan seluruh pemangku kepentingan (UNESCO, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal akademik, dan referensi lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperkuat dasar teoritis sebelum pelaksanaan penelitian serta untuk melengkapi hasil penelitian yang diperoleh. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap beragam pengetahuan, pemikiran, dan temuan dalam literatur ilmiah, yang kemudian digunakan untuk memberikan kontribusi secara teoritis maupun metodologis terhadap suatu isu tertentu. Fokus utama dari metode ini adalah mengidentifikasi teori, konsep, prinsip, atau ide yang dapat dimanfaatkan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan (Hazhari dalam Cooper & Taylor, 2020).

## **HASIL PENELITIAN**

Transformasi kurikulum adalah proses yang terus berkembang yang menunjukkan usaha suatu negara dalam menanggapi perubahan zaman, tuntutan masyarakat, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), transformasi kurikulum menjadi sangat penting karena usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan spiritual anak (Unesco, 2006). Kurikulum PAUD tidak hanya harus relevan secara akademik, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai budaya, kebutuhan lokal, serta perkembangan psikologis anak usia dini (Depdiknas, 2004).

Seiring berjalannya waktu, kurikulum PAUD di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan paradigma pendidikan, kebijakan pemerintah, hingga tuntutan globalisasi. Setiap kurikulum yang lahir mencerminkan semangat zamannya dari yang semula berorientasi pada penguasaan materi hingga kini mulai mengedepankan kompetensi, karakter, dan kesejahteraan anak (Mulyasa, 2009). Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan anak tidak bisa stagnan, melainkan harus terus berkembang mengikuti tuntutan sosial dan kebutuhan individu anak yang semakin kompleks.

Perubahan kurikulum di Indonesia bukan hanya terjadi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga di tingkat PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari pentingnya membangun sistem pendidikan yang kuat sejak usia dini. Transformasi kurikulum PAUD dari tahun 1984 hingga kini mencerminkan perjalanan panjang menuju pendidikan yang lebih holistik, partisipatif, dan berorientasi pada perkembangan anak (Suyadi, 2012).

## **PEMBAHASAN**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran krusial dalam membentuk dasar kepribadian, nilai, dan kemampuan anak sejak dini. Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap kualitas pendidikan pun terus berubah. Hal ini mendorong pemerintah dan para ahli pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Sejak diberlakukannya Kurikulum 1984 hingga saat ini, kurikulum PAUD di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, baik dari segi pendekatan, isi materi, maupun tujuan pembelajarannya. Artikel ini akan menelusuri perjalanan panjang perubahan kurikulum PAUD, mengkaji latar belakang perubahannya, serta dampaknya terhadap praktik pendidikan anak usia dini.

Berikut ini adalah penjabaran perubahan kurikulum PAUD dari tahun ke tahun, mulai dari Kurikulum 1984 hingga Kurikulum Merdeka yang sedang berlaku saat ini. Uraian perjalanan transformasi kurikulum PAUD di Indonesia dari masa ke masa yang mencerminkan evolusi pendekatan pendidikan anak usia dini seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan kebijakan nasional.

### **Kurikulum Tahun 1984**

Kurikulum 1984 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia karena memperkenalkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif melalui kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, hingga eksperimen. Peran guru pun bergeser dari sumber utama informasi menjadi fasilitator yang mendampingi proses belajar siswa (Depdikbud, 1984). Kelebihan dari kurikulum ini adalah kemampuannya untuk mendorong siswa agar lebih kreatif, aktif, dan berpikir secara kritis. Di samping itu, pendekatan CBSA turut mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi antar siswa.

Kelebihan Kurikulum 1984: (1) Mengutamakan interaksi belajar yang bersifat dua arah antara pendidik dan anak, bukan sekadar penyampaian materi secara satu arah. (2) Memiliki pemisahan antara materi inti dan penunjang, yang membantu guru fokus pada kompetensi dasar. (3) Mendorong pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada pengalaman langsung siswa.

Kekurangan / Hambatan Kurikulum 1984: (1) Kurangnya pemahaman guru terhadap konsep CBSA dan terbatasnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. (2) Banyak guru di daerah yang belum siap menerapkan metode ini secara maksimal, terlebih dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran aktif (Sagala, 2005). (3) Resistensi dari sebagian guru dan orang tua yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang berorientasi pada proses (Suparlan, 2001).

Kurikulum ini kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Kurikulum 1994, yang mencoba mengatur beban materi dan waktu belajar lebih sistematis, meskipun masih mempertahankan semangat pembelajaran aktif. Jika dibandingkan dengan Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 jauh lebih progresif karena menekankan proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhirnya.

Sementara jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum setelahnya, seperti Kurikulum 1994 dan 2004, kurikulum ini menjadi fondasi awal dari arah pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa (Mulyasa, 2009). Oleh karena itu, Kurikulum 1984 dapat dikatakan sebagai titik awal perubahan paradigma pendidikan di Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis dan humanis, meski penerapannya masih belum ideal secara menyeluruh pada masa itu.

### **Kurikulum Tahun 1994**

Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1984 yang lahir sebagai respons terhadap kompleksitas penerapan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) serta kebutuhan akan penyesuaian struktur kurikulum di semua jenjang pendidikan. Kurikulum ini menitikberatkan pada penyampaian materi yang padat dan terstruktur, dengan pembagian waktu belajar menggunakan sistem semester dan alokasi waktu per mata pelajaran yang lebih rinci. Kurikulum ini masih mengakomodasi pendekatan CBSA, namun dengan penekanan yang lebih besar pada penguasaan materi, sehingga cenderung akademik (Depdikbud, 1994).

Kelebihan Kurikulum 1994: (1) Memiliki struktur dan pedoman pembelajaran yang seragam secara nasional, memudahkan guru dalam merancang pembelajaran. (2) Jadwal pelajaran yang teratur dan terstandar untuk semua sekolah. (3) Memberikan kejelasan dalam pembagian waktu pembelajaran dan jumlah jam pelajaran. (4) Mengatur standar isi secara nasional, sehingga ada kesetaraan materi antar daerah. (5) Cocok untuk jenjang yang lebih tinggi karena menekankan penguasaan akademik.

Kekurangan Kurikulum 1994: (1) Muatan materi terlalu padat, menyebabkan beban belajar siswa tinggi, termasuk pada anak usia dini (Mulyasa, E. 2009). (2) Pendekatan yang digunakan masih sangat teacher-centered, membuat anak kurang aktif. (3) Kurang memberikan ruang untuk pengembangan karakter, kreativitas, dan eksplorasi anak. (4) Membatasi ruang gerak guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak di kelas. (5) Tidak sesuai untuk PAUD karena lebih berfokus pada capaian kognitif, bukan perkembangan holistik anak (Suyadi. 2012).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Kurikulum 1994 adalah rendahnya tingkat fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan serta konteks lokal peserta didik. Selain itu, kurikulum ini juga masih memiliki keterbatasan dalam penerapan pendekatan tematik, terutama pada jenjang PAUD yang seharusnya menempatkan aktivitas bermain sebagai landasan utama dalam proses belajar (Suparlan, 2001). Kurikulum ini kemudian mengalami perubahan melalui hadirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, yang lebih memfokuskan pada pencapaian kompetensi dibandingkan sekadar penguasaan materi.

Apabila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (1984), Kurikulum 1994 terlihat lebih administratif dan cenderung padat isi, sedangkan kurikulum setelahnya (2004 dan seterusnya) mulai memberi ruang pada pendekatan holistik yang lebih menghargai proses perkembangan anak. Maka, Kurikulum 1994 dapat dikatakan sebagai masa transisi yang masih berorientasi pada akademik, namun menjadi jembatan menuju kurikulum yang lebih fleksibel dan kompetensi-berbasis di masa mendatang.

#### **Kurikulum Tahun Kbk(2004)**

Kurikulum PAUD tahun 2004, yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), merupakan sebuah langkah maju dalam perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kurikulum ini disusun untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. KBK hadir menggantikan Kurikulum 1994 dengan pendekatan yang lebih terfokus pada pencapaian kompetensi. Penerapan KBK adalah menggunakan sistem silabus dan RPP.

Tiga komponen utama menjadi dasar dalam penerapan kurikulum ini, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik anak, penetapan indikator evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, serta pengembangan metode pengajaran yang mendukung tercapainya kompetensi tersebut.

Kelebihan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi: (1) Relevan dan Kontekstual, pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman langsung membuat materi lebih mudah dipahami karena berkaitan erat dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari anak. (2) Penguatan Kompetensi Dasar, kurikulum ini memberikan landasan yang kokoh untuk mendukung perkembangan keterampilan penting anak, mulai dari sosial dan emosional hingga kognitif dan fisik. (3) Fleksibel dan Adaptif, dengan sifatnya yang fleksibel, kurikulum ini memungkinkan guru menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kondisi lingkungan tempat anak-anak belajar.

Kekurangan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi: (1) Tantangan dalam Implementasi, pelaksanaan kurikulum ini menuntut ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi pendidik, serta dukungan aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif. (2) Evaluasi yang Menyeluruh, menilai perkembangan anak, khususnya dalam aspek sosial, emosional, dan kreativitas, masih menjadi tantangan tersendiri karena ketiga aspek tersebut bersifat subjektif dan tidak selalu mudah diukur secara objektif.

Kurikulum 2004 tidak hanya menekankan pembentukan karakter peserta didik, tetapi juga ada tantangan untuk mendorong pengembangan potensi mereka secara menyeluruh. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki keterampilan dan keahlian yang memungkinkan mereka untuk bersaing dan bertahan dalam berbagai situasi kehidupan (Uce, 2016).

Dalam implementasinya, Kurikulum Berbasis Kompetensi berlandaskan pada Empat pilar pendidikan universal meliputi: belajar untuk memahami, belajar untuk bertindak, belajar untuk membentuk kepribadian secara utuh, serta belajar untuk hidup bersama dalam harmoni (Fitriani et al., 2022). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang dirancang oleh Departemen

Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai bentuk penyempurnaan dari Kurikulum 1994. Perumusan KBK dimulai pada tahun 2000 dan mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2004, sehingga kurikulum ini juga sering disebut sebagai Kurikulum 2004. Dalam implementasinya, KBK menggunakan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai dasar operasional dalam proses pembelajaran.

Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan berbagai aspek Kemampuan yang dimiliki peserta didik mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai, sikap, serta minat, agar sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kebutuhan individu. Perubahan kurikulum, termasuk penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Langkah ini menjadi strategi penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional. Upaya ini sejalan dengan amanat Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 35, dijelaskan bahwa lulusan harus memiliki kompetensi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar pendidikan nasional (Sugianto, 2022).

Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan Kurikulum 1994. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada fokus pembelajaran. Jika Kurikulum 1994 lebih menekankan pada penguasaan materi, maka KBK lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi peserta didik, dengan mengacu pada paradigma pembelajaran UNESCO yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Dalam hal penyusunan silabus, Kurikulum 1994 menggunakan silabus nasional yang seragam, sedangkan pada KBK, guru memiliki keleluasaan untuk menyusun silabus sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, sehingga peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Jumlah jam belajar pada KBK juga lebih banyak, yaitu 40 jam per minggu dibandingkan 32 jam pada kurikulum sebelumnya, meskipun jumlah mata pelajaran belum mengalami pengurangan.

Dari sisi metode pembelajaran, KBK mengadopsi pendekatan keterampilan proses yang melahirkan strategi pembelajaran aktif seperti PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dan CTL (Contextual Teaching and Learning), berbeda dengan pendekatan yang lebih tradisional pada Kurikulum 1994. Dalam sistem penilaian, Kurikulum 1994 lebih dominan menilai aspek kognitif, sedangkan KBK mengintegrasikan penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pendekatan Penilaian yang berfokus pada proses pembelajaran di kelas merupakan bagian dari KBK, yang ditopang oleh empat elemen utama, yaitu Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB), Penilaian Berbasis Kelas (PBK), Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta Pengelolaan Kurikulum oleh Sekolah (PKBS), yang tidak secara eksplisit tercantum dalam Kurikulum 1994.

### **Kurikulum Tahun 2009**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk perbaikan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang menuntut adanya desentralisasi, otonomi, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan. Sebelumnya, sistem pendidikan yang sentralistik membuat sekolah sangat tergantung pada kebijakan pusat, sehingga membatasi ruang gerak untuk berinovasi dan berkreasi di tingkat sekolah. KTSP mencakup empat komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, struktur serta isi kurikulum, kalender akademik, dan penyusunan silabus beserta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Muslih, 2007, hlm. 29).

KTSP adalah wujud dari reformasi di bidang pendidikan yang memberi kewenangan kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum secara independen, dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, serta karakteristik dan tuntutan daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyusun kurikulum dan mengatur proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang dimiliki. Oleh karena itu, pihak sekolah dituntut untuk menyusun strategi yang efektif, menentukan prioritas, serta mengelola dan memaksimalkan berbagai sumber daya yang tersedia di lingkungan internal maupun eksternal sekolah. Selain itu, sekolah juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kurikulum tersebut kepada masyarakat dan pemerintah.

Secara garis besar, implementasi KTSP bertujuan untuk memperkuat kemandirian serta memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Kurikulum ini juga mendorong sekolah agar terlibat secara aktif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama diterapkannya KTSP antara lain: (1) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum serta mengelola

dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. (2) Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen sekolah dan masyarakat dalam merancang kurikulum melalui proses pengambilan keputusan yang kolaboratif. (3) Membangun suasana kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan guna mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum yang disusun dan dikembangkan di tingkat sekolah, sehingga memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Adapun ciri utama KTSP meliputi: (1) Memberikan kebebasan bagi sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang selaras dengan karakteristik lingkungan sekitar, kemampuan siswa, potensi sumber daya yang tersedia, serta kekhasan wilayah masing-masing. (2) memungkinkan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran. (3) menuntut guru untuk memiliki kemandirian dan daya cipta; dan (4) memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih serta menerapkan metode pembelajaran yang dianggap paling tepat.

Pelaksanaan kurikulum di sekolah mencakup pengelolaan kegiatan operasional dan koordinasi antara berbagai pihak di sekolah untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Proses implementasi kurikulum melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Namun, dalam prakteknya, penerapan KTSP sering menghadapi berbagai tantangan. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, sekolah perlu melakukan persiapan yang matang. Menurut Sukmadinata, beberapa hambatan yang ditemui antara lain: (1) Kurangnya keseragaman menjadi hambatan, terutama bagi wilayah-wilayah yang memerlukan standar yang seragam guna menjaga persatuan secara nasional. (2) Ketiadaan standar penilaian yang konsisten, yang menyulitkan perbandingan antara kemajuan antar sekolah. (3) Kesulitan dalam pengolahan dan penilaian secara nasional. (4) Belum semua sekolah siap untuk merancang dan mengembangkan kurikulum secara mandiri.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai diterapkan pada tahun 2009 sebagai bagian dari desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan kurikulumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Meskipun memiliki semangat kemandirian, dalam praktiknya KTSP menghadapi berbagai tantangan, di antaranya sebagai berikut: (1) Kesiapan Guru yang Belum Merata, tidak semua guru memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam menyusun kurikulum secara mandiri. Banyak guru mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengembangkan silabus, menyusun indikator, dan menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Hal ini ditegaskan oleh Ibrahim Bafadal, Direktur Pembinaan SD Kemendikbud, yang menyatakan bahwa “tidak semua guru dibekali profesionalisme untuk membuat kurikulum, sehingga banyak yang hanya mengadopsi” (Kompas.com, 28 November 2012). (2) Kesenjangan Mutu Antar Satuan Pendidikan, kebebasan menyusun kurikulum menyebabkan kualitas pendidikan antar sekolah menjadi tidak merata. Sekolah yang memiliki guru berkualitas dan sumber daya lengkap mampu menyusun kurikulum dengan baik, sementara sekolah dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan. Hal ini berdampak pada kesenjangan hasil belajar dan mutu lulusan antarwilayah (Depdiknas, 2008). (3) Minimnya Supervisi dan Evaluasi, pelaksanaan KTSP memerlukan pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Namun, dalam prakteknya pengawasan tersebut belum berjalan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar pengawas belum memiliki pemahaman mendalam tentang konsep KTSP, sehingga pengawasannya belum efektif. (4) Tuntutan administratif dalam KTSP menjadi tantangan tersendiri bagi guru, karena mereka diwajibkan menyusun berbagai perangkat pembelajaran secara menyeluruh, seperti silabus, RPP, program tahunan, dan program semester. Beban administrasi ini kerap menyita banyak waktu, sehingga perhatian guru terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas menjadi berkurang (Mulyasa, 2009).

Dalam banyak kasus, guru lebih fokus pada pelaporan daripada pada inovasi pembelajaran. (1) Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, tidak mendapatkan pelatihan teknis yang memadai dalam implementasi KTSP. Selain itu, fasilitas dan media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan kurikulum juga masih terbatas. Hal ini menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan secara merata (UNESCO IIEP, 2011). (2) Kurang Responsif terhadap Tuntutan Abad 21. KTSP masih cenderung fokus pada penguasaan materi kognitif dan belum mengintegrasikan secara menyeluruh keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi,

komunikasi, dan pemanfaatan teknologi. Padahal, keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global di masa depan (Trilling & Fadel, 2009).

Kelebihan dari Kurikulum 2009 (KTSP) antara lain: (1) KTSP mengusung prinsip desentralisasi sebagai salah satu fokus utamanya. Pendekatan ini menjadi kekuatan tersendiri karena memungkinkan setiap satuan pendidikan untuk lebih bebas mengekspresikan karakteristik dan identitasnya, serta dianggap lebih responsif dalam menghadapi tantangan pembelajaran di Indonesia. (2) KTSP juga mendorong lahirnya konsep globalisasi yang bersifat lokal (Fedrik A. Kande, 2008: 83). Hal ini berkaitan erat dengan semangat desentralisasi yang diusung KTSP, yang pada akhirnya memperkuat keberagaman budaya lokal alih-alih menyeragamkannya.

Beberapa kelemahan dari Kurikulum 2009 (KTSP) antara lain: (1) Meskipun sistem desentralisasi menjadi salah satu keunggulan KTSP, di sisi lain hal ini juga menjadi kelemahannya. Sebab, tidak semua satuan pendidikan di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang merata dan memadai. Akibatnya, pemberian kewenangan penuh kepada sekolah untuk merancang kurikulum secara mandiri berisiko menimbulkan kegagalan dalam penyusunan program pembelajaran. (2) Penetapan Ujian Nasional sebagai tolok ukur utama keberhasilan pendidikan juga menjadi sorotan (Fedrik A. Kande, 2008: 84). Jika dikaitkan dengan konsep Kurikulum Nasional yang memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki beragam jenis kecerdasan, maka penerapan satu standar penilaian yang sama untuk semua siswa bertentangan dengan pandangan tersebut dan menimbulkan persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2009 sebagai pengganti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Dalam KTSP, setiap satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri, dengan menyesuaikan pada potensi serta kebutuhan lokal, namun tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perubahan yang Terjadi pada Kurikulum KTSP: (1) Desentralisasi Pengembangan Kurikulum, KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih sentralistik. (2) Penekanan pada Kompetensi, KTSP menekankan pada pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik, dengan fokus pada pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. (3) Struktur Kurikulum yang Lebih Fleksibel, Struktur kurikulum dalam KTSP lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian mata pelajaran dan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi sekolah. (4) Evaluasi Berbasis Sekolah, KTSP mendorong evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, termasuk penilaian formatif dan sumatif yang disesuaikan dengan kurikulum yang disusun dan disesuaikan oleh tiap-tiap lembaga pendidikan secara mandiri.

KTSP kemudian digantikan oleh Kurikulum 2013 (K-13) yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013. K-13 memperkenalkan pendekatan pembelajaran tematik integratif, penilaian autentik, dan penguatan pendidikan karakter. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman.

### **Kurikulum Tahun 2013**

Keberhasilan penerapan kurikulum di lingkungan sekolah sangat bergantung pada kontribusi utama guru dan kepala sekolah. sebagai pelaksana utama di lapangan. Kedua tokoh ini memegang peranan penting dalam mengarahkan dan menggerakkan berbagai elemen pendidikan agar berjalan selaras dengan tujuan kurikulum yang ditetapkan.

Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 (K13), para pendidik dituntut untuk menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi, salah satunya melalui perencanaan perangkat pembelajaran yang matang. Guru memiliki tanggung jawab dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) yang dituju oleh peserta didik. Kurikulum ini menekankan pentingnya kemandirian guru dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi proses pembelajaran secara menyeluruh agar capaian yang diperoleh telah memenuhi harapan (Jaya, 2017).

Secara historis, kata "kurikulum" berasal dari bahasa Yunani, "currere," yang berarti "jarak yang ditempuh dalam lari." Istilah ini kemudian digunakan dalam dunia pendidikan sebagai metafora perjalanan pembelajaran siswa. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan istilah "manhaj," yang berarti "jalan yang terang," yang berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan (Hasan, 2013).

Sebagaimana dikemukakan oleh Kreshna Aditiya dalam kutipan Trisnawati pada jurnalnya, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berorientasi pada penguatan karakter, yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pengembangannya, Mulyasa (dalam Trisnawati, 2016) mengemukakan empat komponen utama yang perlu menjadi perhatian, yakni: (1) Penyusunan rencana pembelajaran dan materi ajar yang terstruktur, termasuk kegiatan belajar yang relevan. (2) Pemahaman mendalam mengenai sifat dan kebutuhan peserta didik. (3) Penetapan tujuan pembelajaran. (4) Penentuan kriteria pencapaian tujuan.

Salah satu pendekatan khas yang diusung dalam Kurikulum 2013 ialah model pembelajaran berbasis 5M mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyajikan sebagaimana dijelaskan oleh Rijal (2018). (1) Mengamati: Peserta didik diarahkan untuk mengamati objek atau fenomena pembelajaran secara langsung. (2) Menanya: Setelah melakukan pengamatan, peserta didik diajak untuk bertanya dan menggali informasi lebih dalam. (3) Menalar: Guru membantu peserta didik untuk membangun pemahaman melalui proses berpikir logis dan sistematis. (4) Mencoba: Peserta didik diberikan peluang untuk menguji pemahaman mereka dengan cara melakukan latihan atau eksperimen yang relevan. (5) Menyajikan: Peserta didik diharapkan dapat menyampaikan atau mengaplikasikan hasil pembelajaran yang telah mereka peroleh dalam bentuk yang jelas dan terstruktur.

Kurikulum 2013 hadir sebagai upaya pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menekankan pada pendekatan berbasis kompetensi dan penguatan karakter peserta didik. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk menghasilkan proses pembelajaran yang dinamis dan melibatkan siswa secara aktif, menyeluruh, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, sebagaimana kebijakan pendidikan lainnya, Kurikulum 2013 juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya.

Berikut merupakan pemaparan secara sistematis: Kelebihan Kurikulum 2013: (1) Kurikulum ini mendorong aktivitas dan kreativitas siswa dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Siswa diharapkan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. (2) Penilaian dalam kurikulum ini bersifat komprehensif, mencakup tidak hanya hasil ujian akademik, tetapi juga sikap, keterampilan praktis, nilai-nilai religius, dan karakter sosial siswa. (3) Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah. (4) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi inti dan dasar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mengacu pada standar kompetensi nasional. (5) Pendekatan pembelajaran kurikulum ini bersifat holistik, dengan fokus pada pengembangan kompetensi yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa.

(6) Kurikulum ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Materi pembelajaran mengakomodasi kebutuhan keterampilan abad 21, seperti softskill, kewirausahaan, dan metodologi pembelajaran aktif. (7) Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Sosial. Kurikulum 2013 dirancang untuk merespons berbagai dinamika sosial, baik yang terjadi di lingkungan lokal, nasional, maupun internasional. (a) Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pembentukan sikap difokuskan pada konteks lingkungan sekitar siswa. (b) Di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sosial sehari-hari. (c) Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), pembentukan kepribadian diarahkan agar mencerminkan jati diri bangsa dalam konteks pergaulan global. (8) Penilaian Berbasis Kompetensi. Standar penilaian mengacu pada tiga ranah utama: menyeimbangkan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. (9) Melaksanakan remediasi secara rutin. Siswa yang belum mencapai kompetensi tertentu diberikan kesempatan mengikuti remedial untuk perbaikan hasil belajar. (10) Ketersediaan Dokumen dan Bahan Ajar dari Pemerintah. Seluruh komponen kurikulum, termasuk buku teks dan panduan pembelajaran, telah disiapkan oleh pemerintah sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan.

Kekurangan Kurikulum 2013: (1) Kesalahan Persepsi terhadap Peran Guru. Sebagian guru menganggap bahwa mereka tidak lagi perlu menjelaskan materi secara langsung. Padahal, dalam pembelajaran sains seperti Matematika atau Fisika, peran guru sebagai fasilitator dan penjelas tetap sangat dibutuhkan. (2) Tingkat Kesiapan Guru yang Beragam. Tidak semua guru siap melaksanakan pendekatan kreatif dan partisipatif. Bahkan, dalam beberapa kasus, guru masih kesulitan mengembangkan pembelajaran yang dapat menstimulasi kreativitas siswa. (3) Kebutuhan Penguatan Profesionalisme Guru. Diperlukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan

kompetensi guru, khususnya dalam memahami peran barunya sebagai pendamping dan motivator dalam proses pembelajaran.

Penerapan Kurikulum 2013 tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan muncul dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, hingga siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk instansi yang berwenang, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, serta motivasi pribadi guru. Jika salah satu elemen ini mengalami kendala, maka pelaksanaan kurikulum bisa terhambat.

Salah satu masalah utama terletak pada pengelolaan waktu dalam buku guru dan buku siswa. Banyak materi yang tidak sebanding dengan alokasi waktu yang tersedia di kelas. Selain itu, beberapa konten dalam buku juga ditemukan kurang tepat bahkan terdapat kesalahan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penyusunan buku oleh pemerintah dilakukan secara terburu-buru. Dalam situasi seperti ini, peran guru sangat penting. Guru perlu bersikap kritis terhadap isi buku, dan tidak ragu melakukan penyesuaian materi agar sesuai dengan konsep yang benar. Urutan materi dalam pembelajaran pun tidak wajib mengikuti buku secara kaku, melainkan bisa disusun ulang sesuai dengan logika dan kebutuhan siswa di kelas. Guru memiliki kebebasan akademik untuk menyesuaikan materi agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa.

Masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tematik adalah Kendala yang dialami oleh guru terutama terletak pada upaya menggabungkan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran. Banyak guru yang masih kesulitan untuk menggabungkan pelajaran-pelajaran berbeda dalam suatu tema yang sama. Padahal, tujuan dari pembelajaran tematik adalah untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran agar siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan bermakna. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara konsep, keterampilan, sikap, dan nilai dari berbagai mata pelajaran. Namun, kenyataannya banyak guru yang masih mengajar dengan cara konvensional, yaitu menyampaikan materi satu per satu, tanpa hubungan yang kuat antar tema. Hal ini menyebabkan tujuan pembelajaran tematik sebagai pendekatan yang holistik tidak tercapai.

Guru yang belum memahami secara mendalam bagaimana mengembangkan tema dalam pembelajaran akan kesulitan menghubungkan materi antar mata pelajaran. Ditambah lagi, jika pembelajaran tidak dirancang dengan metode yang kreatif dan inovatif, maka proses belajar hanya akan menjadi penyampaian materi tanpa makna mendalam. Hal ini tentu berdampak pada tidak tercapainya standar kompetensi yang ditargetkan.

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu membutuhkan kemampuan guru untuk menyatukan seluruh muatan pelajaran dalam satu alur pembelajaran yang mengalir. Sayangnya, buku guru yang seharusnya menjadi panduan masih belum sepenuhnya mendukung proses ini karena beberapa tema disusun dengan pendekatan yang masih terpisah-pisah. Dari sisi hasil belajar siswa, penerapan Kurikulum 2013 belum menunjukkan dampak yang signifikan di beberapa sekolah. Hal ini wajar, karena ada sekolah yang masih dalam tahap awal penerapan kurikulum ini, sehingga proses adaptasi masih berlangsung.

Kurikulum merupakan panduan utama dalam proses pendidikan yang mencerminkan arah dan tujuan pembelajaran suatu bangsa. Seiring perkembangan zaman dan tantangan global yang terus berubah, sistem pendidikan Indonesia pun memerlukan pembaruan agar mampu menyiapkan peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Salah satu upaya pembaruan tersebut diwujudkan melalui penerapan Kurikulum 2013 yang hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya.

(1) Alasan Pengembangan: Kurikulum 2013 dirancang sebagai pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP (2006). Pengembangan ini dilandasi oleh berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar dunia pendidikan: Tantangan internal mencakup kebutuhan untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan kesiapan menghadapi bonus demografi usia produktif Indonesia yang diperkirakan memuncak antara tahun 2020 hingga 2035. Tantangan eksternal meliputi tuntutan globalisasi, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, rendahnya skor pelajar Indonesia dalam studi internasional seperti PISA dan TIMSS, serta berbagai persoalan sosial dan karakter bangsa.

(2) Unsur Perubahan Utama. Empat komponen penting yang mengalami perubahan dalam Kurikulum 2013 adalah: Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang kini mengintegrasikan keseimbangan antara

sikap (afektif), keterampilan (psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif). Standar Isi yang berubah dari berfokus pada isi mata pelajaran menjadi berbasis kompetensi, dengan pendekatan tematik terutama di jenjang SD. Standar Proses yang mengungkap pembelajaran ilmiah (scientific learning) melalui lima langkah: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Standar Penilaian yang beralih ke penilaian otentik (authentic assessment) yang menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dan kontekstual. (3) Perubahan Pola Pikir Guru. Implementasi Kurikulum 2013 tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan paradigma di kalangan pendidik. Guru dituntut untuk: Mengubah pendekatan dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran. Mengedepankan proses berpikir kritis dan pembentukan karakter. Menjadi pribadi yang reflektif, inovatif, dan terus belajar. (4) Dampak terhadap Proses Belajar. Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 lebih: Berpusat pada siswa dan berbasis aktivitas. Mengedepankan kerja sama, pemecahan masalah, dan pembelajaran kontekstual. Memanfaatkan berbagai sumber belajar dan lingkungan sekitar.

### **Kurikulum Merdeka**

Merdeka Belajar adalah sebuah langkah transformasi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan ini dirancang untuk membuka ruang kebebasan berpikir bagi seluruh elemen pendidikan, dimulai dari guru hingga siswa. Menurut Nadiem Makarim (2020), kebebasan berpikir harus lebih dulu dimiliki oleh para guru, sebab mereka adalah sosok utama yang akan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Ia menekankan bahwa tanpa proses pemaknaan terhadap kompetensi dasar dan kurikulum yang telah ada, maka pembelajaran sejati tidak akan pernah terjadi.

Rencana kedepannya, sistem pendidikan di Indonesia direncanakan untuk mengalami perubahan besar yang mencakup suasana belajar di dalam maupun di luar kelas. Proses pembelajaran akan disusun agar lebih menyenangkan dan melibatkan partisipasi aktif, dengan mendorong siswa untuk berdialog dengan guru dan belajar dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter. Pendekatan ini tidak hanya mengarahkan siswa untuk memahami materi pelajaran, tetapi juga untuk berkembang menjadi individu yang percaya diri, mandiri, sopan, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kehidupan nyata. Selain itu, sistem pendidikan baru ini tidak hanya fokus pada pengelompokan nilai akademik, mengingat hasil survei menunjukkan bahwa hal tersebut seringkali menjadi beban bagi siswa dan orang tua. Sebaliknya, sistem ini mengakui bahwa setiap anak memiliki kecerdasan dan potensi yang berbeda di bidangnya masing-masing.

Melalui sistem ini, diharapkan lahir generasi pelajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap terjun ke dunia kerja dan hidup bermasyarakat dengan budi pekerti yang luhur (Widya, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yakni Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 11 Desember 2019 dalam pertemuan bersama seluruh kepala dinas pendidikan se-Indonesia. Kebijakan ini mencakup empat poin utama: (1) Penghapusan Ujian Nasional (UN) yang kemudian digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Penilaian ini berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi siswa, dilakukan di kelas 4, 8, dan 11, serta tidak menentukan kelulusan, melainkan sebagai alat untuk mengevaluasi proses belajar. (2) Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diserahkan kepada masing-masing sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dalam menentukan metode penilaian, misalnya melalui portofolio, proyek, atau penugasan lainnya. (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan menjadi cukup satu halaman, agar guru dapat lebih fokus pada pengajaran daripada urusan administratif. (4) Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperluas dengan penambahan jalur afirmasi dan prestasi. Pemerintah daerah diberi kewenangan menetapkan zonasi masing-masing wilayah, kecuali untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Nadiem,2020).

Kurikulum Merdeka adalah bentuk inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, dan selaras dengan tuntutan masa kini. Kurikulum ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa keunggulan serta kelemahan dari Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan zaman. (1) Struktur kurikulumnya dirancang lebih ringkas namun tetap mendalam, sehingga memungkinkan siswa memahami konsep secara lebih utuh. (2) Kurikulum ini memprioritaskan materi yang esensial dan relevan dengan tahap perkembangan peserta didik,

sehingga pembelajaran menjadi lebih terfokus. (3) Suasana belajar yang dihadirkan lebih menyenangkan dan bermakna karena siswa tidak dipaksa untuk mengejar target secara tergesa-gesa, melainkan diberikan waktu yang cukup untuk memahami materi. (4) Siswa jenjang SMA diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki, tanpa terikat oleh jurusan tertentu. (5) Guru juga diberikan keleluasaan dalam merancang proses pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi mengajar dengan karakteristik serta kebutuhan siswa, yang berdampak pada terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan personal.

Kekurangan Kurikulum Merdeka: (1) Pelaksanaan yang Belum Sepenuhnya Siap. Di berbagai daerah, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala, baik dari sisi kesiapan sekolah maupun tenaga pengajar. (2) Sistem dan Konsep Belum Terwujud Secara Menyeluruh. Meskipun kurikulum ini memiliki tujuan yang baik, namun banyak konsepnya yang belum terealisasi dengan baik dalam praktik di lapangan. (3) Keterbatasan SDM dan Fasilitas Pendukung. Kurangnya tenaga pendidik yang memahami sepenuhnya Kurikulum Merdeka, ditambah dengan minimnya fasilitas penunjang, menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. (4) Sistem Pelaksanaan yang Belum Terstruktur Merata. Belum adanya standar implementasi yang merata di seluruh wilayah menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran antar sekolah dan daerah.

Tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia sangat besar dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum ini: (1) Penguatan Peran Guru sebagai Pilar Utama. Guru memiliki peran krusial dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memfasilitasi berbagai program pembelajaran, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan profil Pelajar Pancasila. Untuk itu, pengembangan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya aspek pengetahuan yang perlu diperkuat, tetapi juga aspek psikologis, keterampilan sosial, dan sikap adaptif terhadap dinamika masyarakat. Berbagai metode pelatihan seperti workshop, diskusi kelompok, dan pemberdayaan jaringan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menjadi sangat penting dalam mencapainya. (2) Pemberdayaan Teknologi dalam Pembelajaran. Sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka, pemberdayaan teknologi digital menjadi hal yang tak terelakkan. Guru perlu menguasai berbagai platform pembelajaran digital, termasuk penggunaan media online dan metode pembelajaran hybrid. Dengan kemampuan ini, proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, menarik, dan kontekstual. Selain itu, peserta didik juga dapat dilatih untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan inovatif, mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. (3) Pentingnya Jaringan Kemitraan yang Kuat. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada dukungan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat. Sinergi antara pihak-pihak ini sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih bermakna. Jaringan komunikasi yang efektif akan membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan memungkinkan berbagi inspirasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan. (4) Peran Asesmen dalam Pembelajaran. Salah satu tantangan besar lainnya adalah pelaksanaan asesmen yang menyeluruh. Asesmen tidak hanya terbatas pada ujian akhir (sumatif), tetapi juga harus mencakup asesmen awal dan proses pembelajaran (formative assessment). Melalui asesmen yang terintegrasi ini, hasilnya dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran harus dilihat sebagai sebuah siklus yang saling terhubung, di mana asesmen berfungsi sebagai alat untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan proses serta hasil pembelajaran.

Kehadiran Kurikulum Merdeka menjadi salah satu langkah maju yang layak diapresiasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum ini tak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga menghadirkan semangat baru yang mendorong pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan. Ada lima hal penting yang menjadi sorotan dan patut kita beri jempol: (1) Pembelajaran yang Lebih Bebas dan Fleksibel, Salah satu hal paling mencolok dari Kurikulum Merdeka adalah kebebasan guru dalam merancang pembelajaran. Tidak lagi terikat pada pola lama yang serba kaku, guru kini bisa menyesuaikan metode mengajarnya dengan kebutuhan, karakter, dan potensi siswa. Ini membuka peluang besar untuk menghadirkan pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu, menstimulasi kreativitas, dan membentuk pengalaman belajar yang lebih personal dan menyenangkan. (2) Menumbuhkan Kemandirian Siswa, Kurikulum ini juga memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk tumbuh sebagai individu yang mandiri. Tak hanya mengejar nilai, siswa diajak untuk mengasah

kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja dalam tim. Pembelajaran diarahkan agar mereka bisa mengelola proses belajarnya sendiri dan siap menghadapi tantangan dunia nyata yang kompleks dan dinamis. (3) Teknologi sebagai Sahabat Belajar. Di tengah era digital, Kurikulum Merdeka mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Teknologi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi mitra strategis untuk memperluas akses, memperkaya sumber belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Di sinilah guru ditantang untuk terus mengembangkan diri, agar mampu mengoptimalkan teknologi sebagai alat bantu yang inspiratif dan efektif. (4) Penilaian Berbasis Perkembangan, Bukan Angka Semata, salah satu pendekatan baru yang menyegarkan dari kurikulum ini adalah cara mengevaluasi siswa. Penilaian tidak hanya terfokus pada hasil akhir berupa angka, melainkan juga memperhatikan proses belajar dan kemajuan tiap siswa. Guru diajak untuk memahami perjalanan belajar siswa secara menyeluruh, dan memberi dukungan yang sesuai agar mereka bisa terus tumbuh dan berkembang. (5) Orang Tua sebagai Mitra Pendidikan. Kurikulum Merdeka juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sekolah dan orang tua. Peran orang tua tidak hanya sebatas memantau nilai, tapi ikut terlibat dalam membentuk pengalaman belajar anak. Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik, lingkungan belajar menjadi lebih kuat, holistik, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh baik di rumah maupun di sekolah.

## SIMPULAN

Perubahan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mencerminkan usaha berkelanjutan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, serta kebutuhan anak-anak usia dini. Sejak diberlakukannya Kurikulum 1984 yang mengusung pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), berbagai pembaruan terus dilakukan. Kurikulum 1994 menonjolkan pendekatan akademik, Kurikulum 2004 mengedepankan kompetensi, KTSP 2009 bersifat desentralistik, Kurikulum 2013 fokus pada pendidikan karakter dan pembelajaran tematik, hingga akhirnya muncul Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan anak. Masing-masing kurikulum memiliki keunikan, keunggulan, sekaligus tantangannya sendiri. Namun, benang merah dari seluruh perubahan tersebut adalah semangat untuk terus memperbaiki mutu pendidikan PAUD agar semakin relevan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Perubahan kurikulum tak hanya sebatas pada isi dan metode pembelajaran, tetapi juga menuntut perubahan cara pandang para pendidik, peningkatan kualitas guru, dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Namun begitu, tantangan terbesar dalam pelaksanaan kurikulum baru adalah kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta kesenjangan pelaksanaan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, transformasi kurikulum PAUD tidak cukup hanya dituangkan dalam kebijakan, tetapi juga perlu diiringi dengan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, kurikulum benar-benar dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk membentuk generasi anak Indonesia yang cerdas, mandiri, kreatif, dan berkarakter sejak dini.

## REFERENSI

- Al Maarif, M. F. (2023, November 16). Kurikulum Merdeka membawa 5 perubahan. BBPMP Provinsi Jawa Timur. <https://bbpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/kurikulum-merdeka-membawa-5-perubahan>
- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak: The importance of childhood education for child development. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1).
- Atikah, C. (2023). Kurikulum pembelajaran anak usia dini. *Mitra Ilmu*.
- Aufa, A., Khairani, Y. D., Hasana, T. F., Daulay, F. A., Nst, N. F., & Harahap, A. O. (2024). Pengaruh perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka terhadap pembelajaran di kelas V A SDN 101765 Bandar Setia. *JPBB: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(3), 143–151. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i3.3901>
- Burhan Nurgiyantoro. (2012). Pendidikan anak usia dini dalam perspektif kurikulum. *Jurnal PAUD*, 6(1), 1–10.

- Depdikbud. (1984). Kurikulum 1984: Pedoman proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. (1994). Kurikulum 1994: Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. (1994). Kurikulum 1994: Pendidikan Menengah Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar SMU. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdiknas. (2004). Pedoman umum pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Jakarta: Direktorat PAUD.
- Depdiknas. (2008). Panduan pengembangan KTSP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Evi Munastiwi. (2014). Dinamika kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yogyakarta: UNY Press.
- Fadhila, Azzahra, F., Purba, K. N. E., Bahari, B., & Siregar, D. Y. (2023). Perkembangan kurikulum di Indonesia dan dampak perkembangannya terhadap kualitas pendidikan. *Journal of Global Humanistic Studies*, 2(1), 1–6.
- Fitriani, N., & Afrilianti, D. (2025). Analisis kurikulum berbasis kompetensi (KBK)/Kurikulum 2004. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(3), 222–227.
- Hasan, S. (2013). Marliana, Anatomi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. *Jurnal Al-Ibrah*, 2(1), 60–87.
- Hasibuan, J. J., & Moedjiono. (1995). Proses belajar mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haryati, L. F., Anar, A. P., & Ghufron, A. (2022). Menjawab tantangan era society 5.0 melalui inovasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5197–5202.
- Hazhari, A. (2020). Meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui gerak dan lagu “Bernyanyi dengan riang”. *Journal of Early Childhood Education (JoEE): Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 30–40.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). Ilmu pendidikan: Konsep, teori dan aplikasinya.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Jaya, H. N. (2017). Keterampilan dasar guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. *Didaktis: Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1), 23–35. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/1555/1275>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Panduan pembelajaran jarak jauh: Bagi guru selama sekolah tutup dan pandemi COVID-19 dengan semangat Merdeka Belajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah. <https://bpmppkaltara.kemdikbud.go.id/>
- Khaironi, M., & Yuliasri, N. (2017). Pendidikan moral pada anak usia dini. *Jurnal Golden Age*, 1(1), 1–15.
- Kompas.com. (2012, November 28). Kurikulum baru dirancang karena KTSP dinilai tak efektif. <https://edukasi.kompas.com>
- Laela, N. (2023). PENGELOLAAN KURIKULUM MERDEKA DI KB AL FAWWAZ. *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5. No. 2. <https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol5.no2>
- Muqorobin, M. (2025, April 13). Tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *KSPTK*. <https://kspstendik.dikdasmen.go.id/artikel/detail/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>
- Mulyasa, E. (2009). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah panduan praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursalim, A., Nofirman, N., Rais, R., & Ghazali, A. (2024). Transformasi kurikulum di Indonesia: Perkembangan terkini dan tantangan dalam menghadapi era artificial intelligence. *Innovative:*

- Journal of Social Science Research, 4(4), 8482–8491. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Evaluasi pelaksanaan KTSP. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Rijal, F. (2018). Guru profesional dalam konsep Kurikulum 2013. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 328. <https://doi.org/10.22373/jm.v8i2.3235>
- Sagala, S. (2005). Konsep dan makna pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar. Bandung: Alfabeta.
- Setiyadi, B. (2020). Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. *Khawzanah Pendidikan*, 24(1), 173–184.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan kurikulum terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i1.2>
- Slameto. (2015). Rasional dan elemen perubahan Kurikulum 2013. *Scholaria*, 5(1), 1–9.
- Suparlan, P. (2001). Menuju pendidikan yang relevan dan bermutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, Y., Khoirunnisa, D., & Sari, D. A. (2024). Kebijakan kurikulum PAUD Indonesia dari masa ke masa. *JPMP: Jurnal Pelita Manajemen Pendidikan*, 1(2), 86–106.
- Suyadi. (2012). Strategi pembelajaran PAUD. Yogyakarta: Pedagogia.
- Tabrani, & Dkk. (2024). Manajemen pendidikan anak usia dini (Rika Ariyani, Ed.). Qriset Indonesia.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
- Trisnawati, Gunawan, D., & Nongkeng, D. H. (2016). Perbandingan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 di SMAN 1 Sinjai Utara. *Jurnal Mirai Management*, 1(September), 1–9.
- UNESCO. (2006). ECCE curriculum guidelines. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO IIEP. (2011). Capacity development in curriculum implementation. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Widya Ningsih. (2020). Merdeka belajar melalui empat pokok kebijakan baru di bidang pendidikan. *Suara Guru Online*. Diakses 30 Juli 2020 pukul 12.20 WIB.
- Windayani, N. L. I., Dewi, N. W., Yuliantini, S., Widyasanti, N. P., Ariyana, I. K. S., Keban, Y. B., Mahartini, K. T., Dafiq, N., & Ayu, P. E. S. (2021). Teori dan aplikasi pendidikan anak usia dini. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Yunita, L., & Suryana, D. (2022). Pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12526–12532.